

BAB II

TINJAUAN UMUM SEKULARISME DI TURKI

A. Pengertian Sekularisme

Kata sekular (*secular* dalam bahasa Inggris) berasal dari kata *saeculum* dalam bahasa Latin, yang artinya “periode besar waktu” atau lebih dekat “spirit zaman”. Belakangan, maknanya berubah menjadi “dunia ini” yang secara tidak langsung mengindikasikan bahwa ada lebih dari satu dunia. Istilah ini akhirnya diterjemahkan menjadi konsep “sekular” dan “religius” yang berasal dari ide temporal dan spiritual.¹

Sekularisme (*secularism* dalam bahasa Inggris) berarti bersifat keduniaan (*worldly*), non-agama (*irreligious*), non-spiritual (*mundane*). Lawan katanya adalah: suci (*holy*), yaitu bersifat keagamaan (*religious*), wakil dari langit (*vicegerent of God*), di luar alam dan hukum-hukumnya (*unearthly, transcendental*).² Dalam bahasa Arab, sekularisme diterjemahkan dengan *ilmaniyyah*. *The Short Oxford Dictionary* mendefinisikan sekularisme sebagai “doktrin bahwa moralitas seharusnya semata-mata didasarkan pada penghargaan atas umat manusia dalam kehidupan sekarang ini, dengan membuang semua pertimbangan yang

¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, terj. Sri Murniati (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 60

² Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, terj. Musthalah Maufur (Jakarta: Robbani Press, 1998), 43

diambil dari keyakinan pada Tuhan atau hari akhirat.”³ Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan perbedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas.⁴

Istilah sekularisme pertama kali dikemukakan oleh George Jakob Holyoke pada tahun 1864. Holyoke menggunakan istilah ini dalam arti sebagai filsafat praktis untuk manusia yang menafsirkan dan mengorganisir kehidupan tanpa bersumber dari supranatural. Secara terminologis Holyoke memaknai sekularisme sebagai paham pemisahan agama dari segala aspek kehidupan, yang dengan sendirinya akan melahirkan pemisahan agama dari negara dan politik.⁵

Menurut Yusuf Qaradhawy, sekularisme adalah memisahkan agama dari kehidupan individu atau sosial dalam artian agama tidak boleh ikut berperan dalam pendidikan, kebudayaan maupun dalam hukum. Dengan kata lain, sekularisme memisahkan Tuhan dari hukum dan

³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *ibid.*, 61

⁴ Wikipedia, *Sekularisme*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Sekularisme>, diakses pada 11 September 2013 jam 10.12 WIB

⁵ Tim Karya Ilmiah KAISAR'08 Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo, *Aliran-aliran Teologi Islam* (Kediri: KAISAR, 2008), 352

undang-undang mahluk-Nya. Tuhan tidak boleh mengatur manusia, sehingga manusia bebas untuk membuat aturan hukumnya sendiri.⁶

Lebih lanjut Qaradhawy membagi sekularisme menjadi dua, yaitu sekularisme yang netral/moderat dan sekularisme yang agresif memusuhi agama. Sekularisme yang moderat adalah sekularisme liberal yang dianut oleh negara-negara Eropa/Barat dan Amerika, dimana HAM diakui, termasuk juga kebebasan beragama. Sedangkan sekularisme yang memusuhi agama adalah sekularisme Marxis yang dianut oleh Uni Soviet dan Rusia yang atheis dan memusuhi agama.⁷

Selain itu, berdasarkan kasus sekularisme yang terjadi di negara-negara Islam, Qaradhawy juga membedakan sekularisme menjadi moderat dan ekstrim. Sekularisme moderat adalah sekularisme yang tidak menyerang Islam, tidak mengganggu akidahnya, syi'ar-syi'ar dan hukum-hukumnya yang asasi, namun mengabaikan sebagian yang diwajibkan Allah dan melakukan sebagian yang diharamkan-Nya. Sedangkan sekularisme ekstrim adalah sekularisme yang “memakai baju liberalisme dan menyanyikan lagu demokrasi”, seperti halnya sekularisme di Turki.⁸

Baik sekularisme yang netral/moderat maupun yang agresif/memusuhi agama, yang moderat maupun yang ekstrim, menurut Qaradhawy, tetaplah sebuah bentuk pemisahan agama terhadap kehidupan

⁶Yusuf Qaradhawi, *Sekuler Ekstrim*, terj. Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 3

⁷*Ibid.*, 4-5

⁸*Ibid.*, 108

manusia. Ini tidak sesuai dengan Islam dan tidak bisa dibenarkan.⁹ Sekalipun yang moderat, tetap saja mengindikasikan adanya pandangan bahwa agama itu berbahaya, atau setidaknya tidak lagi bisa menjadi pedoman bagi manusia, sehingga manusia lebih memilih membuat hukum seenaknya sendiri.¹⁰

Sementara Yusuf Qaradhawy menginterpretasikan secara tegas bahwa sekularisme tidak sesuai dengan Islam, pandangan yang lebih kontroversial mengenai interpretasi sekularisme dikemukakan Nurcholish Madjid. Dikatakan kontroversial karena menurut Cak Nur, sekularisasi itu bisa diterima, bahkan itu adalah yang harus dilakukan oleh umat Islam sebagai konsekuensi perkembangan masyarakat di zaman modern ini. Lalu bagaimana Nurcholish Madjid menginterpretasikan sekularisme?

⁹ Senada dengan pendapat Qaradhawy, Altaf Gauhar juga mengemukakan ketidak-cocokan antara agama dengan sekularisme. Keduanya tidak akan bisa disatukan meskipun ada usaha untuk mewujudkan macam-macam sintesa, atau memasukkan salah satu ke dalam yang lainnya dalam bentuk-bentuk yang praktis. Altaf Gauhar, *Tantangan Islam* (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salam ITB, 1984), 334

¹⁰ John L. Esposito menyatakan bahwa sebagian muslim memang memiliki pandangan seperti halnya Qaradhawy mengenai sekularisme. Menurutnya, pandangan seperti itu lebih karena ketidak-seimbangan dalam melihat kasus-kasus sekularisme yang terjadi. Umat Islam yang memandang sekularisme seperti halnya Qaradhawy, sebenarnya lebih dikarenakan kurangnya perhatian dan pemahaman mengenai makna dari sekularisme modern. Kasus sekularisme yang terjadi di Turki maupun Perancis semakin memperkuat kepercayaan mereka bahwa sekularisme akan membawa suatu negara menjadi anti agama. Pandangan seperti itu tidak diimbangi dengan pemahaman yang lebih serius terhadap sekularisme di beberapa negara-negara Eropa maupun Amerika yang justru dengan memisahkan agama dan negara, akan lebih menjamin kebebasan beragama di negara tersebut. Artinya, keberlangsungan suatu agama akan lebih terjaga. John L. Esposito, *Islam Aktual*, terj. Norma Arbi'a Juli Setiawan (Depok: Inisiasi Press, 2005), 169-170. Senada dengan Esposito, Luthfi Assyaukanie menyatakan bahwa penolakan kaum muslim terhadap sekularisme selama ini karena mereka merujuk pada pengalaman negara-negara yang gagal menerapkan prinsip ini, seperti halnya yang terjadi di Turki. Alangkah tidak *fair* jika mengecam sekularisme semata-mata karena kita merujuk pada praktik sekularisme yang salah. Luthfi Assyaukanie, *Islam Benar Versus Islam Salah* (Depok: KataKita, 2007), 242-244

Nurcholish Madjid mengartikan sekularisme sebagai suatu paham yang menyatakan bahwa Tuhan tidak berhak mengurus masalah-masalah duniawi. Masalah-masalah duniawi harus diurus dengan cara lain yang tidak datang dari Tuhan. Jadi, sekularisme adalah paham tidak ber-Tuhan dalam kehidupan duniawi manusia.

Orang sekular yang konsekuen dan sempurna adalah jelas atheis. Sedangkan orang sekular yang tidak konsisten adalah orang yang mengalami kepribadian pecah, dimana di satu sisi dia percaya akan Tuhan, namun di sisi lain tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam masalah-masalah duniawi. Orang-orang ini memandang kehidupan keagamaan hanya berfungsi untuk menghubungkan diri seseorang manusia dengan Tuhannya (ibadah dalam arti sempit). Sedangkan untuk masalah-masalah duniawi, mereka memilih untuk memecahkan dan menyelesaikannya dengan cara-cara dan atas landasan-landasan-landasan yang lain. Tentu saja ini tetaplah tidak sesuai dengan Islam.¹¹

Nurcholish Madjid melanjutkannya dengan membedakan sekularisme dengan sekularisasi. Menurutnya, sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme. Jika sekularisme merupakan sebuah paham atau ideologi, maka sekularisasi tidak bisa diartikan sempit (yaitu sebagai penerapan dari paham orang-orang yang berideologi

¹¹Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008), 190-191

sekular), melainkan lebih kepada setiap bentuk *liberating development*¹². Sekularisasi merupakan sebuah proses penduniawian, memberi perhatian lebih besar daripada sebelumnya pada kehidupan duniawi. Dalam perkembangan sejarah manusia, sekularisasi akan terus terjadi, tidak terkecuali pada umat Islam.¹³

Bagi umat Islam sendiri, menurut Nurcholish Madjid, sekularisasi yang diperbolehkan adalah sekularisasi tanpa sekularisme. Sekularisasi tanpa sekularisme adalah sekularisasi yang terbatas dan dengan koreksi. Pembatasan dan koreksi itu diberikan oleh kepercayaan akan adanya hari kemudian dan prinsip ketuhanan.¹⁴ Untuk itu umat Islam sendiri harus bisa membedakan nilai-nilai Islam mana yang transendental dan mana yang temporal, karena sekularisasi hanya diperuntukkan bagi wilayah temporal.¹⁵

¹²Yang dimaksud Nurcholish Madjid dengan *liberating development* adalah sebagai pembebasan persepsi yang usang dan membuat umat Islam sulit untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang kian modern. Salah satu penyebabnya adalah ketidak-sanggupan umat Islam membedakan nilai-nilai transendental dan temporal sehingga tidak jarang semua nilai menjadi diukhrawikan semua. Inilah yang mengakibatkan tidak terlihatnya semangat berjihad dalam perkembangan umat Islam. *Ibid.*, 190

¹³Pendapat tersebut identik dengan yang dikemukakan oleh Harvey Cox. Menurutnya, sekularisasi berarti proses penduniawian hal-hal yang memang bersifat duniawi. Namun, karena pengaruh Hellenistik, makna sekular telah berubah menjadi merujuk pada sesuatu yang inferior, yaitu lebih mengarah pada pertentangan “dunia ini” dan “dunia agama”. Implikasinya, dunia agama yang kekal-abadi dianggap lebih hebat dari dunia yang bersifat sementara. Lihat Harvey Cox, *The Secular city: Secularization and Urbanization in Theological Perspective* (New York: New American Library, 1967), 17

¹⁴Nurcholish Madjid, *ibid.*, 244

¹⁵ Lebih khusus Nurcholish Madjid menjelaskan, dalam Islam aktifitas kultural, seperti politik dan kenegaraan, semuanya dapat dilakukan dengan kebebasan kreatifitas yang besar, karena pada dasarnya suatu perkara di luar ibadat diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama. Inilah yang mendasari Nurcholish Madjid membedakan antara sekularisme dan sekularisasi, dimana sekularisasi dimaknai sebagai langkah yang bersifat kultural. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2008), cxxi. Pandangan yang hampir sama dikemukakan oleh Harvey Cox bahwa sekularisasi berarti proses

Jika mau melihat makna sekularisasi secara lebih positif, maka di mata Islam, sebenarnya sekularisasi dapat diartikan sebagai pembuka ruang *ijtihad* publik.¹⁶ Sebab bagaimanapun, wilayah duniawi itu ada, yaitu wilayah di mana semua umat bisa hidup dan mengatur kehidupannya. Dalam wilayah ini, permasalahan-permasalahan tidak bisa dipecahkan hanya melalui pendekatan-pendekatan yang sifatnya partikularistik, seperti melalui cara-cara yang bercorak kultural dan keagamaan.

Sebenarnya, baik Yusuf Qaradhawy, Nurcholish Madjid, maupun tokoh-tokoh yang lain, memiliki pokok pandangan yang sama dalam menginterpretasikan sekularisme, yaitu sebagai paham atau ideologi yang tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Namun, seperti halnya masalah-masalah yang muncul akibat modernisasi dan perubahan kultur masyarakat secara dinamis di berbagai wilayah dunia, interpretasi sekularisme berkembang menjadi sangat beragam dan banyak menimbulkan pro-kontra, bahkan di kalangan tokoh-tokoh Islam sendiri.

Bagi tokoh-tokoh tradisional, sekularisme diartikan dengan tegas sebagai ideologi yang keliru. Namun bagi tokoh-tokoh modern, seperti halnya Nurcholish Madjid, penataan konsep yang tepat dengan pertimbangan perubahan kehidupan masyarakatlah yang harus ditekankan.

sejarah dan melalui proses tersebut masyarakat dibebaskan dari penguasaan gereja dan sistem metafisika tertutup. Dalam melihat sekularisasi, yang diperhatikan Cox adalah dunia, bukan gereja ataupun dunia supranatural lainnya. Harvie M. Conn, *Teologia Kontemporer* (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 1988), 64

¹⁶ Moeslim Abdurrahman, *Islam Yang Memihak* (Yogyakarta: LKis, 2005), 195

Bassam Tibi misalnya, mengatakan bahwa tokoh-tokoh tradisional kerap kali salah paham tentang konsep sekularisasi dan secara keliru menafsirinya sebagai pertanda kehancuran agama. Padahal menurutnya, sekularisasi tidak berarti penghapusan agama, namun lebih pada pemilahan fungsional dimana agama memerankan signifikansi sosial dari alam yang berbeda dan memelihara makna dari hal-hal yang duniawi.¹⁷

Namun meskipun pro-kontra terjadi, ranahnya masih berada di wilayah pemaknaan sekularisasi. Kebanyakan tokoh-tokoh tradisional penentang sekularisme menyimpulkan bahwa sekularisasi adalah penerapan dari ideologi sekularisme. Artinya bahwa para pelaku sekularisasi adalah orang-orang sekular, dan tidak mungkin dilakukan orang-orang yang memegang teguh agamanya. Adapun jika tokoh-tokoh modern menyatakan bahwa sekularisasi bisa diadopsi dalam masyarakat Islam, maka sebenarnya tokoh-tokoh modern tersebut terlalu terpengaruh dengan sejarah Kristen Barat. Gagasan sekularisasi tersebut tidak lebih dari upaya menjiplak eksperimen Barat dan menjustificasikannya dengan mencari dasar pemahaman dari ajaran Islam.¹⁸

¹⁷Bassam Tibi, *Krisis Peradaban Islam Modern*, terj. Yudian W. Asmin, Naqiyah Mukhtar, dan Afandi Mukhtar (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 169

¹⁸ Adnin Armas, *Pengaruh Kristen-Orientalis Terhadap Islam Liberal* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 22

Terlepas dari kontroversi mengenai sekularisasi, apakah merupakan konsekuensi mutlak dari sekularisme atau bukan, Donald Eugene Smith mencirikan sekularisasi pemerintahan menjadi 4 aspek:¹⁹

1. Pemisahan pemerintahan

Sekularisasi pemisahan pemerintahan maksudnya ialah memisahkan pemerintahan dari ideologi-ideologi keagamaan dan struktur-struktur eklesiastik. Dalam hal ini, pemisahan pemerintahan tersebut mencakup pemisahan kaitan-kaitan atau keputusan-keputusan untuk menciptakan hubungan pada tempat pertama antara agama dan pemerintah. Hasil pemisahannya seringkali berupa penciptaan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pemerintah tidak lagi melaksanakan fungsi-fungsi keagamaan: tidak lagi melakukan pemeliharaan tempat ibadah, tidak berpartisipasi dalam ritual dan perayaan agama, tidak menggaji para agamawan, dan semacamnya.

Ada tiga pola sekularisasi pemisahan pemerintahan:²⁰

a. Pemisahan revolusioner

Dalam tipe pemisahan ini, dilakukan perubahan menyeluruh yang relatif modern dan sekular terhadap apa yang ada pada rezim keagamaan tradisional²¹. Namun di sini perubahan baru mulai berfungsi sepanjang garis-garisnya tanpa berusaha memikul

¹⁹ Donald Eugene Smith, *agama di tengah sekularisasi politik*, terj. Azyumardi Azra dan Hari Zamharir (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 91-92

²⁰ Donald Eugene Smith, *ibid.*, 98-103

²¹ Sistem politik keagamaan tradisional adalah sistem politik yang ideologi-ideologi politiknya disediakan oleh agama, termasuk juga legitimasi atas penguasa didasarkan atas dasar keagamaan. Sistem politik ini berjalan sebelum masa-masa dimana ideologi-ideologi politik sekular belum muncul. Donald Eugene Smith, *ibid.*, 62

peran keagamaan rezim lama. Artinya, pemisahan pemerintahan ini hanya merupakan tahap awal untuk selanjutnya digunakan penguasa dalam upaya pelenyapan elemen-elemen tradisional yang dipandang bertentangan dengan ideologi revolusioner karena bagaimanapun, tujuan akhirnya adalah revolusi pemerintahan.²²

b. Pemisahan konstitusional

Dalam tipe ini, pemisahan dilakukan melalui proses konstitusional. Agama dan Negara memang dipisahkan, namun keduanya tetap utuh bahkan setelah hubungan antara keduanya rusak hebat. Artinya, masih terdapat kesinambungan dalam institusi-institusi antara keduanya baik sebelum maupun setelah pemisahan terjadi. Pemisahan tipe ini dapat dilihat dalam fenomena Kristen Barat dimana terjadi pemisahan antara gereja dan Negara.²³

c. Tanpa pemisahan

Dalam tipe ini, sekularisasi memang terjadi, namun bisa dikatakan tidak ada pemisahan antara agama dan Negara. Latar belakangnya bisa bermacam-macam. Di Negara-negara Asia dan Afrika Utara misalnya, dimana justru pada masa-masa kebebasan politik dari imperialis Eropa, yang dominan dalam politik adalah gerakan-gerakan nasionalis yang kebanyakan berideologi sosialis dan sekular. Sehingga setelah kebebasan politik itu diraih,

²² *Ibid.*, 98

²³ *Ibid.*, 100

pemerintahan sudah otomatis menjadi sekular tanpa adanya pemisahan dengan agama.²⁴

2. Ekspansi pemerintahan

Pada aspek ini, pemerintah melakukan ekspansi untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengaturan dalam bidang sosial ekonomi yang semula ditangani struktur-struktur keagamaan. Pemerintah tidak lagi hanya memisahkan pemerintahan dengan agama, melainkan memperluas wilayah kekuasaannya kedalam wilayah kehidupan sosial ekonomi yang semula diatur struktur-struktur keagamaan. Biasanya sekularisasi tahap ekspansi ini dilatar-belakangi dua hal, yaitu untuk membangun kedaulatan internal negara sepenuhnya dan untuk melaksanakan reformasi sosial yang besar. Sebagai contohnya, di bidang hukum, dalam dunia muslim modern pastilah terganggu dengan adanya lembaga poligami yang merupakan lembaga sah dan diperbolehkan hukum agama. Maka disini pemerintah mengadakan sekularisasi terhadap hukum tersebut, setidaknya-tidaknya sebagian.²⁵

3. Penilaian silang (*transvaluation*)

Maksudnya ialah penilaian silang atas kultur politik guna menekankan tujuan-tujuan dan alasan-alasan keduniaan yang tidak transenden. Aspek yang ketiga ini lebih rumit dari dua aspek sebelumnya. Sekularisme atas kultur politik mengacu pada perubahan-perubahan dasariyah dalam nilai-nilainya, memakan waktu lama,

²⁴ *Ibid.*, 101

²⁵ *Ibid.*, 103

karena penyelenggaraan perubahan nilai-nilai tersebut dilaksanakan secara bertahap. Biasanya melalui pendidikan formal, atau yang lebih jelas lagi lewat perubahan-perubahan teknologi, perkembangan ekonomi, industrialisasi, dan lain-lain, yang mana dari semua itu, sebenarnya, pemerintah tidak punya kontrol penuh (terbatas).²⁶

Yang mendasari sekularisme kultur politik ini muncul adalah karena adanya kemerosotan nilai-nilai keagamaan secara jelas meliputi keseluruhan masyarakat. Religiusitas dan kesalehan tidak lagi bernilai tinggi. Orang-orang mulai skeptis dengan doktrin agamanya. Ditambah lagi tuntutan paham relativisme tentang kebenaran semua agama. Sebagai contohnya, orang-orang Islam di Indonesia tidak lagi berkorban dan menabung selama tiga puluh tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji.

Ada dua segi utama sekularisasi dalam kultur politik:²⁷

1. Sekularisasi basis legitimasi

Dalam segi ini, sekularisasi terjadi di wilayah basis legitimasi dalam pemerintahan. Agama, yang merupakan sumber legitimasi bagi pemerintah dalam sistem politik keagamaan tradisional, mulai mengalami kerapuhan karena tidak lagi dianggap keabsahannya. Tujuan-tujuan pemerintahan tidak lagi ditentukan oleh gagasan-gagasan keagamaan. Ketika dogma-dogma agama ada konflik dengan program-program pemerintah dalam hal

²⁶ *Ibid.*, 120

²⁷ *Ibid.*, 122-126

kesejahteraan masyarakat, maka dogma-dogma agama tersebutlah yang akan disepelkan atau bahkan dihapuskan.

2. Sekularisasi identitas kelompok

Dalam segi ini, kultur politik yang mengalami sekularisasi adalah pada identitas kelompok. Pada mulanya, dalam sistem politik keagamaan tradisional, yang menjadi identitas kelompok masyarakat adalah agama. Namun seiring berkembangnya kemodernan dan ekspansi bangsa Eropa, identitas kelompok mengalami perubahan-perubahan. Nasionalisme muncul menggantikan peran agama sebagai identitas kelompok. Lebih jauh lagi, paham pluralisme keagamaan yang muncul semakin memantapkan bahwa identitas nasional yang benar hanya dapat berkembang pada landasan-landasan sekular.

4. Kekuasaan pemerintah

Dalam sekularisasi tahap ini pemerintah dilibatkan dalam menyerang basis-basis keagamaan kebudayaan umum dan secara paksa memberlakukan ideologi sekular terhadap kultur politik. Pemerintah mengambil alih agama untuk mengurangi secara drastis pengaruh agama, atau bahkan menghapusnya. Atau bisa juga untuk menata kembali agama dan mereformasinya sehingga membawanya ke dalam garis yang sama dengan program modernisasi rezim penguasa. Dalam menolak setiap otonomi bidang keagamaan, negara bergerak dengan premis-premis totaliter, sungguhpun seluruh filsafatnya tidak secara

eksplicit totaliter. Fenomena sekularisasi ini terjadi di beberapa negara seperti Prancis, Meksiko, Rusia, Cina, dan Turki.²⁸

Pada tiga proses sekularisasi yang pertama di atas, dapat diamati dengan sangat luas di seluruh dunia. Seiring berkembangnya kemodernan, proses sekularisasi ini bisa dikatakan merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Agama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, atau setidaknya begitu dalam beberapa aspek. Bahkan karena alasan itulah, terjadi sekularisasi radikal di beberapa negara seperti yang dijelaskan pada aspek keempat di atas.

Anggapan bahwa agama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat inilah yang melatar-belakangi tokoh-tokoh tradisional menginterpretasikan sekularisme dengan tegas sebagai musuh agama. Dan konsekuensinya, mereka menyimpulkan bahwa proses sekularisasi adalah tidak bisa dibenarkan karena berakar pada ideologi sekularisme. Pandangan inilah yang coba dirubah oleh para tokoh modern seperti halnya Nurcholish Madjid dengan melihat segala perubahan masyarakat di era modern.

B. Kondisi Perpolitikan Turki Pasca Atatürk

Untuk mengetahui kondisi perpolitikan Turki paska Mustafa Kemal, maka perlu untuk kembali melihat sekilas bagaimana Mustafa Kemal mendirikan Republik Turki. Sebagaimana telah diterangkan pada

²⁸ *Ibid.*, 126

latar belakang sebelumnya, bahwa dulunya Turki adalah negara kekhilafahan. Sistem politiknya berupa sistem politik keagamaan tradisional dimana segala program dan kebijakan disandarkan pada ketentuan-ketentuan agama. Namun pasca perang Turki, sistem ini secara bertahap dirubah oleh Mustofa Kemal, sehingga yang kita kenal sekarang adalah Republik Sekular Turki.

Pada bulan Oktober 1923, Turki resmi menjadi Negara republik melalui amandemen yang disahkan oleh Majelis Akbar Nasional melalui sidang pleno. Dalam sidang itu juga disahkan bahwa agama Negara Turki adalah Islam, dan Mustofa Kemal diangkat menjadi presiden dari republik islam pertama di dunia itu. Artinya, pada saat itu politik mulai dipisahkan dengan agama. Kekhilafahan dipisahkan dari Negara Turki menjadi semacam kepausan di Italia.²⁹

Namun kondisi seperti ini belum cukup bagi Mustofa Kemal. Dia menginginkan Turki sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki kedaulatan penuh. Dan untuk itu harus ada pemutusan hubungan yang menyeluruh dengan hak kekuasaan Islam lama, bukan hanya pada prakteknya tetapi juga teorinya. Dan akhirnya pada tanggal 1 Maret 1924, Mustofa Kemal kembali membuka sidang baru majelis dengan pokok bahasan usaha penjagaan dan stabilisasi politik, diciptakannya sistem pendidikan nasional yang seragam, dan keharusan untuk membersihkan

²⁹Edward Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, terj. Enna Hadi dan Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1984), 123

dan meningkatkan iman islam, dan membebaskannya dari posisinya sebagai alat politik. Hasilnya pada tanggal 3 Maret, majelis menyatakan bahwa khalifah telah digulingkan, kekhilafahan ditiadakan, dan seluruh anggota keluarga Usmaniyah diusir dari wilayah Turki.³⁰

Bahkan setelah kekhilafahan ditiadakan, Mustofa Kemal masih terus melakukan serangkaian kebijakan dan hukum yang radikal demi membatasi peran agama hingga hanya sebagai sistem kepercayaan privat, yang terpisah dari ruang publik. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain menutup sekolah-sekolah Islam tradisional, pembubaran pengadilan agama, pembubaran sejumlah tarekat, melarang pemakaian tutup kepala khas Dinasti Usmani (*fes*) bagi laki-laki dan menghalangi perempuan untuk memakai kerudung, mengadopsi kalender Georgian sebagai satu-satunya kalender resmi, mengganti hukum syariah dengan hukum model Swiss, mengganti bahasa Arab dengan bahasa Turki, dan masih banyak lagi. Kesemuanya diarahkan untuk memutuskan hubungan kultural dan intelektual dengan Dinasti Usmani lama.³¹

Penting untuk diketahui bahwa segala upaya reformasi dan sekularisasi yang dipaksakan oleh Mustofa Kemal tidak dilatar-belakangi keinginan untuk menyingkirkan agama. Gerakan-gerakan yang dilakukan tidak dimotivasi oleh atheisme maupun pandangan anti-Islam, namun semata-mata ingin menjadikan negara bisa mengontrol agama.

³⁰*Ibid.*, 124-125

³¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *ibid.*, 357-358

Mustofa Kemal malah selalu menekankan kesetiaan pada Islam. Oleh karena itulah sekularisasi yang dia lakukan hanya mendapat justifikasi kecil dari publik.³²

Salah satu langkah politik brilian yang dilakukan Mustofa Kemal dalam menjaga ideologi kemalismenya adalah dibentuknya Angkatan Bersenjata Turki (*Türk Silahlı Kuvvetleri*) dan Partai Rakyat Republik (*Cumhuriyet Halk Partisi*). TSK merupakan pendukung dan penjaga ideologi sekular yang paling kuat serta pelaksananya yang efektif. Sedangkan CHP merupakan partai tunggal bentukan Mustofa Kemal yang berkuasa dan mendominasi kehidupan politik Turki hingga tahun 1945. Berkat keduanya ideologi sekular kemalis, bahkan sampai saat ini, masih terjaga dan menyulitkan gerakan politik Islam untuk bisa memasuki ranah politik.

Selama pemerintahan Mustofa Kemal Ataturk, Turki secara bertahap berhasil dirubah menjadi negara berideologi sekular. Namun keberhasilan tersebut tidak dapat menghapuskan jiwa Islam masyarakatnya. Bahkan segala upaya sekularisasinya, pada akhir masa-masa kepemimpinannya³³ mulai tidak disenangi oleh masyarakatnya sendiri. Kondisi negara yang mengalami permasalahan ekonomi akibat Perang Dunia Kedua, ditambah lagi munculnya golongan elit nasional

³² *Ibid.*, 359

³³ Mustofa Kemal Ataturk meninggal dunia pada 10 November 1938 dalam usia 57 tahun karena kelelahan yang luar biasa akibat berat dan banyaknya tugas yang ada setelah sakit yang berkepanjangan karena sirosis hati. Kedudukannya sebagai presiden digantikan oleh Ismet Inonu. Wikipedia, *Mustofa Kemal Ataturk*, http://id.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Ataturk, diakses pada tanggal 10 November 2012 jam 12:10 WIB

yang lebih condong ke Barat dan tidak mau membantu rakyat menengah ke bawah, membuat rakyat Turki semakin menginginkan kembalinya hukum Islam yang lama.³⁴

Sepeninggal Mustofa Kemal, keterbukaan jalan bagi gerakan Islam dalam perpolitikan Turki semakin terasa. Pada tahun 1945 presiden Ismet Inonu mengeluarkan kebijakan multipartai. Inonu mengumumkan dia akan menerima adanya formasi satu atau lebih partai oposisi.

Salah satu partai yang muncul membawa angin segar bagi kalangan konservatif Islam adalah partai Demokrat. Partai ini adalah partai sekular beraliran liberal yang terbentuk dari bekas anggota Partai Rakyat Republik. Partai pimpinan Adnan Menderes ini mencoba mengoreksi penyimpangan-penyimpangan sekularisasi yang sudah dijalankan oleh Partai Rakyat Republik.

Pada tahun 1950, partai Demokrat berhasil mencapai kemenangan besar pada pemilihan umum pertama yang bebas dan jujur dalam sejarah republik Turki. Adnan Menderes diangkat sebagai perdana menteri. Selanjutnya pemerintahan yang dipimpinnya melakukan serangkaian kebijakan dalam perbaikan Islam. Kebijakan-kebijakan yang diambil antara lain mengakhiri larangan mengumandangkan adzan dalam bahasa Arab, memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, mendirikan sekolah imam dan khatib, mengadakan

³⁴Edward Mortimer, *ibid.*, 134-135

pembangunan dan perbaikan masjid, memperbolehkan pembacaan Quran dan khutbah-khutbah melalui jaringan radio pemerintah, dan lain-lain.

Selain itu beberapa hal yang semula dianggap tabu kembali bangkit. Lembaga penerbitan Islam mulai bangkit menyiarkan ide-ide tentang Islam. Para buruh dan petani yang awalnya takut mengikuti tarikat, mulai berani mengikuti tarikat-tarikat.³⁵

Partai Demokrat ini dalam masa pemerintahannya mendapatkan dukungan politik dari beberapa kelompok Islam. Salah satu yang terkenal adalah kelompok *Nurculuk* (para pengikut cahaya) yang dipimpin oleh Badi'uzzaman Sa'id Nursi. Kelompok ini banyak memberikan imbauan bagi pemerintah dan rakyat Turki untuk kembali menegakkan Islam yang sebenarnya, yaitu berdasarkan Quran dan Syari'at. Imbauan tersebut didasari oleh pamflet-pamflet tulisan oleh Sa'id Nursi yang diterbitkan setelah tahun 1950 dengan judul *Risale-I Nur* (Risalah cahaya).³⁶

Selain Nurculuk, organisasi Islam lain banyak bermunculan paska keleluasaan yang diberikan oleh pemerintahan Turki tahun 1950-an. Organisasi tersebut diantaranya yaitu *Tinjaniya*, suatu kelompok dari golongan sufi modern yang dulunya tidak ada di Turki, namun dijumpai di wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat. Ada juga *Sulaimancis*, kelompok agama militan yang mempunyai tujuan untuk membentuk tentara Islam pengganti tentara republik dan mengembalikan kekhilafahan. Selain itu

³⁵ Akhmad Taufiq *et.all.*, *Metodologi Study Islam* (Malang: Bayumedia, 2004), 176

³⁶ Edward Mortimer, *ibid.*, 138-139

juga bermunculan kelompok-kelompok berlatar-belakang non-agama, namun memiliki kecenderungan pada agama.³⁷

Kejayaan Partai Demokrat yang didukung oleh banyak kalangan Islam membawanya menjadi partai yang terkesan pro terhadap Islam. Di satu sisi, partai ini diuntungkan karena dapat menarik dukungan dari banyak kalangan, khususnya kalangan Islam konservatif. Namun di sisi lain, hal ini mengusik ketenangan pihak sekular kemalis. Ditambah lagi kondisi kesalahan-pengaturan di bidang ekonomi yang meresahkan masyarakat, menyebabkan pemerintahan Partai Demokrat ini menjadi rawan untuk digulingkan.³⁸ Dan hasilnya, pada tanggal 27 Mei 1960, pihak militer bentukan Mustofa Kemal menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga ideologi sekular kemalis dengan mengadakan kudeta terhadap pemerintahan Adnan Menderes.³⁹

Setelah kudeta militer pertama tersebut, pemerintahan untuk sementara diambil alih oleh militer. Dalam masa tersebut, militer mengeluarkan konstitusi baru yang lebih liberal dengan memperbolehkan partai-partai sayap kiri muncul di Turki. Selain itu, untuk memastikan bahwa Islam tetap berada dalam pengawasan pemerintah, militer juga mencantumkan dibentuknya Direktorat Urusan Agama dalam administrasi pemerintahan pada konstitusi barunya.⁴⁰ Pengambil-alihan kekuasaan oleh

³⁷*Ibid.*, 138-140

³⁸*Ibid.*, 137

³⁹Ahmad Zakarin, *KEBANGKITAN POS-ISLAMISME: Analisis Strategi Dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu* (Solo: Eraintermedia, 2012), 110

⁴⁰Edward Mortimer, *ibid.*, 137

militer ini hanya berlangsung selama delapan belas bulan sebelum akhirnya dikembalikan pada politisi sipil.

Pada periode selanjutnya, muncul partai sayap kanan baru pengganti Partai Demokrat yaitu Partai Keadilan (*Adalet Partisi*) yang dipimpin oleh Suleyman Demirel. Partai ini menjadi pelaksana pemerintahan yang baru usai kudeta militer. Suleyman Demirel sendiri menjadi perdana menteri pada tahun 1965.

Tidak jauh berbeda dengan Partai Demokrat, partai ini juga memberi kelonggaran bagi golongan agama konservatif. Salah satunya yaitu dengan mendirikan institut-institut yang lebih tinggi agama di Istanbul dan Konya yang cocok untuk kalangan konservatif. Selain itu, pada masa pemerintahannya, kalangan konservatif menjadi lebih leluasa untuk mengembangkan pendidikan sehingga melahirkan generasi baru ulama berpikiran tradisional sesuai keinginan mereka.

Meskipun, pada masa pemerintahan Suleyman Demirel, demokrasi semakin berkembang, kondisi tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif terutama di bidang ekonomi. Langkahnya yang mengizinkan adanya usaha bebas tanpa memperhatikan kelompok usaha kecil, mengakibatkan kekhawatiran ekonomi pada sektor perdagangan tradisional.⁴¹ Selain itu, di bidang politik, muncul perselisihan antara

⁴¹*Ibid.*, 140

kelompok kiri militan yang banyak bermunculan, dengan kelompok kanan yang didukung oleh militer.

Dengan alasan ketidak-becusan Suleyman Demirel dan pemerintahannya dalam mengatasi ketidak-stabilan politik dan ekonomi negara, ditambah lagi bermunculannya gerakan berbau Islamis memasuki ranah politik yang dapat mengancam ideologi sekular kemalis seperti partai MNS bentukan Erbakan⁴², maka kudeta kembali dilancarkan oleh kubu militer, tepatnya pada tahun 1971. Suleyman Demirel dipaksa mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri, diiringi dengan pembubaran pemerintahan dan parlemen. Semua partai berhaluan kiri maupun yang berbau keagamaan dibubarkan karena dianggap *trouble maker* serta mengancam ideologi negara.

Pasca kudeta, pemerintahan diambil alih militer. Kemudian selama dua tahun, militer melakukan bongkar pasang perdana menteri hingga tiga kali. Pada masa itu pula militer mempersiapkan amandemen konstitusi bagi kepentingan penguatan peran politik mereka. Barulah setelah itu militer kembali memulihkan demokrasi dengan mengizinkan sejumlah partai dibentuk untuk bisa mengikuti pemilihan umum tahun 1973.

Di kubu Islam, Necmetin Erbakan kembali mendirikan partai baru dengan nama Partai Keselamatan Nasional (*Milli Salamat Partisi*)

⁴²Pada tanggal 26 Januari 1970, Profesor Necmetin Erbakan mendirikan partai Islam pertama dalam sejarah politik Turki Modern dengan nama Partai Ketertiban Nasional (*Milli Nizam Partisi*). Partai ini hanya bertahan selama kurang lebih satu tahun sebelum akhirnya dibubarkan oleh pihak militer seiring kudeta tahun 1971. Ahmad Zakarin, *ibid.*, 21

tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1972. Dalam pemilu tahun 1973, secara mengejutkan, partai yang didirikan Erbakan ini memperoleh kemenangan 11,8 persen suara dan 49 kursi di parlemen. Partainya berada posisi keempat dalam pemilu.⁴³ Ini mengindikasikan awal kebangkitan gerakan Islamis dalam perpolitikan Turki.

Pada masa-masa selanjutnya hingga akhir tahun 1980-an, kondisi perpolitikan Turki masih belum menunjukkan kestabilan. Pemegang pemerintahan hanya berputar antara Bulen Ecevit dari Partai Rakyat Republik dan Suleyman Demirel dari Partai Keadilan. Erdogan sendiri dengan partai Islam barunya bergonta-ganti koalisi dengan kedua partai tersebut. Hingga pada pemilu 1977, partai Erbakan tersebut kehilangan banyak dukungan terutama dari orang-orang Nurcu yang lebih memilih pindah ke Partai Keadilan. Meskipun berada di posisi ketiga dalam pemilu, MSP hanya memperoleh 8,6 persen suara dan 24 kursi di parlemen.

Dalam masa itu pula terjadi banyak pertikaian. Partai sayap kanan yaitu Partai Gerakan Nasional (*Milliyetçi Hareket Partisi*) muncul dan berusaha memberangus pengaruh kelompok kiri. Mereka seringkali mengadakan serangan bersenjata terhadap pelajar-pelajar dan guru-guru sayap kiri, termasuk juga terhadap orang-orang Syi'ah, yang di Turki biasa

⁴³ *Ibid.*, 20

dikenal sebagai orang Alevi.⁴⁴ Hal ini jugalah yang menjadi alasan selanjutnya bagi pihak militer melakukan kudeta.

Selain karena banyaknya pertikaian dan kekerasan yang terjadi, salah satu yang memancing pihak militer untuk kembali melakukan kudeta adalah diadakannya rapat umum di Konya pada tanggal 6 September 1980, dengan agenda menuntut pembebasan Yerusalem. Rapat ini dihadiri delegasi-delegasi dari dua puluh negara Arab.⁴⁵

Maka dengan alasan menjaga stabilitas politik dan kekhawatiran bahaya tumbuhnya gerakan Islamis yang dapat mengancam ideologi bangsa, militer kembali mengadakan kudeta pada tanggal 12 September 1980. Militer kembali mengambil alih pemerintahan selama tiga tahun. Masa itu digunakan oleh militer untuk mengendalikan pemerintahan dan memperkokoh kekuasaannya dalam struktur politik sipil. Barulah setelah itu pemerintahan diserahkan pada politisi sipil dengan hanya mengizinkan tiga partai mengikuti pemilu. Para politisi lama seperti Suleyman Demirel, Bulen Ecevit, dan Necmetin Erbakan dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilu tersebut. Posisi presiden akhirnya diserahkan pada Kenan Evren, sang pemimpin militer dalam kudeta tahun 1980. Diapun menjabat sebagai presiden selama tujuh tahun.

Pasca kudeta militer tahun 1980, ternyata tidak menyurutkan gerakan Islamis untuk tetap turun di dunia politik. Bahkan pada tahun

⁴⁴ Edward Mortimer, *ibid.*, 142

⁴⁵ *Ibid.*, 143

1983, Necmetin Erbakan yang pada saat itu mendapatkan larangan berpolitik kembali mendirikan partai Islam ketiganya yaitu Partai Kesejahteraan (*Refah Partisi*).⁴⁶ Namun dalam perjalanannya, Partai Kesejahteraan ini harus melalui dua belas tahun dulu sebelum akhirnya berhasil memenangkan pemilu. Erbakan sendiri baru bisa turun langsung menjalankan partai setelah larangan berpolitiknya dicabut pada tahun 1987.⁴⁷

Meskipun butuh waktu selama kurang lebih dua belas tahun, namun Partai Kesejahteraan ini menunjukkan perkembangan yang bagus. Mulanya pada pemilu tahun 1987, setelah referendum baru dibuat, partai ini mampu berada di posisi lima besar, meskipun belum bisa mendapatkan kursi di parlemen. Barulah pada pemilu tahun 1991 partai ini mampu memperoleh 62 kursi. Dan puncaknya adalah pada pemilu tahun 1995, RP berhasil memenangkan pemilu dengan hampir 22 persen perolehan suara dan 158 kursi di parlemen.⁴⁸ Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Turki modern, gerakan Islamis mampu menguasai pemerintahan. Erbakan pun diangkat menjadi perdana menteri.

Selama memimpin pemerintahan, Erbakan banyak melakukan reformasi, terutama di bidang ekonomi. Dia dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia berhasil mengubah Konya yang dulunya merupakan daerah miskin dan kumuh menjadi kota yang lebih

⁴⁶ Ahmad Zakarin, *ibid.*, 114

⁴⁷ *Ibid.*, 22

⁴⁸ *Ibid.*, 27

inidah dan bergeliat. Hal yang sama juga terjadi di Istanbul setelah walikota Erdogan yang merupakan orang kepercayaan berhasil memecahkan masalah-masalah yang ada di sana.

Namun berbagai keberhasilan yang diraih Erbakan bukannya tanpa hambatan. Di sisi lain langkah-langkah politiknya yang berbau Islamis memberikan *image* buruk terhadapnya. Dia dianggap mencoba merevolusi Turki menjadi negara Islam sebagaimana yang terjadi di Iran. Maka kembali *image* tersebut membuat pihak militer khawatir sehingga merencanakan dilaksanakannya kembali kudeta.

Maka pada tahun 1997, dengan berdasar pada memorandum yang dikeluarkan Dewan Keamanan Nasional tentang sekularisme dan politik Islam dalam pemerintahan, kudeta kembali dilakukan militer berupa memaksa mundur Erbakan dari kursi perdana menteri. Kudeta ini dilanjutkan dengan pembubaran Partai Kesejahteraan oleh Mahkamah Konstitusi dan pelarangan berpolitik bagi Erbakan selama lima tahun.⁴⁹ Ini berarti masa kepemimpinan gerakan Islamis harus terhenti.

Perjuangan Necmetin Erbakan tidak hanya sampai di situ. Pada tahun 1998 dia kembali mendirikan partai berhaluan Islam baru dengan nama Partai Kebajikan (*Fezilet Partisi*). Karena Erbakan mendapatkan larangan berpolitik, maka dalam partai tersebut dia hanya berperan sebagai tokoh kunci di balik layar. Namun hanya dua tahun berselang, partai

⁴⁹ *Ibid.*, 114-118

tersebut kembali dibubarkan dengan alasan yang sama, yaitu mengancam ideologi sekularisme. Padahal pada pemilu tahun 1999, partai tersebut masih mampu mendudukkan wakilnya di parlemen dengan perolehan 111 kursi.⁵⁰

Setelah pembubaran Partai Kebajikan, kelompok Islamis menjadi terpecah. Kelompok Erbakan bersama orang-orang yang setia dengannya sebagai kelompok konservatif mendirikan partai baru dengan nama Partai Kebahagiaan (*Saadet Partisi*). Sedangkan kelompok muda yang dipelopori Recep Tayyeb Erdogan dan Abdullah Gul memisahkan diri dan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (*Adalet ve Kalkinma Partisi*).

Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 2002. Dalam pemilu tersebut, AKP yang muncul sebagai partai non-islam namun pro-Islam, secara mengejutkan berhasil memenangkan pemilu dengan perolehan suara 34 persen dan dapat mengantarkan 363 wakilnya di parlemen. Kondisi bertolak belakang terjadi pada kubu Islamis konservatif pimpinan Erbakan yang hanya mampu memperoleh tidak sampai 3 persen suara.

Ada beberapa hal yang menyebabkan AKP berhasil memenangkan pemilu, diantaranya yang pertama, di internal partainya sendiri AKP memperkenalkan demokrasi yang sehat, berupa pemilihan langsung kandidat wakil partai dalam parlemen, transparansi dalam pengambilan

⁵⁰ *Ibid.*, 27

keputusan, serta membuka perdebatan dalam formulasi kebijakan partai. Kedua, sosok pemimpinnya, yaitu Erdogan, yang mampu memosisikan dirinya sebagai “orang tengah” yang menjembatani modernisme dan tradisionalisme Turki.⁵¹ Kondisi inilah yang membuat AKP dapat menarik simpati semua kalangan, baik dari kubu sekular sampai kalangan Islam konservatif.

Setelah kemenangan pertamanya dalam pemilu 2002, AKP memimpin pemerintahan untuk giat melakukan penguatan-penguatan institusional yang sejalan dengan standart demokrasi yang berkembang. Selain itu penguatan infrastruktur politik juga ditekankan untuk bisa mengimbangi kubu militer dan sekular.⁵² Ini penting berkaca dari nasib kelompok Islamis sebelumnya yang dalam pemerintahannya berujung kudeta.

Salah satu pendukung demokratisasi yang dijalankan pemerintahan AKP adalah media. Lewat media pemerintahan menjadi lebih transparan. Tidak jarang dari media-media tersebut justru mengkritik AKP sendiri atas kecenderungan liberalnya. Namun melalui media ini pula, militer “dilemahkan” dalam campur tangannya terhadap politik. sebagai contoh, *Harian Zaman* yang memberikan perhatian besar atas plot kudeta militer.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, 34-35

⁵² *Ibid.*, 40

⁵³ *Ibid.*, 43

Selain di bidang politik, banyak perubahan yang dibawa oleh pemerintahan AKP baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik luar negeri. Di bidang ekonomi misalnya, pemerintahan AKP mampu menanggulangi krisis ekonomi yang menjadi masalah negara ini sejak Perang Dunia Kedua. Secara bertahap inflasi dapat ditekan, pendapatan nasional tumbuh rata-rata pertahunnya sebesar 7 persen, angka pengangguran turun, hingga utang nasionalpun turun dari 78 persen menjadi 41 persen di tahun 2007.⁵⁴ Tak ayal pemulihan-pemulihan yang berhasil dilakukan semakin memperkokoh partai ini dalam pemerintahan hingga pada pemilu-pemilu berikutnya yaitu tahun 2007 dan 2011 AKP tetap bisa menguasai perlemen.

C. Interpretasi Sekularisme Turki

Sebelum membahas lebih jauh mengenai interpretasi sekularisme yang terjadi di Turki, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah pemahaman dari pendirinya, yaitu Mustofa kemal Ataturk. Latar belakang pendidikannya di sekolah modern dan pendidikan militer yang dikenyamnya telah membentuk pandangan politik yang lebih modern. Terlebih lagi kondisi Turki pada zamannya sedang berada dalam masa-masa kehancuran, seakan merangsang dirinya untuk turut serta mekukan pembenahan-pembenahan di tanah kelahirannya tersebut.

⁵⁴ *Ibid.*, 240-241

Dasar pemikiran Mustofa Kemal Ataturk dalam melakukan pembaharuan di Turki adalah westernisme, sekularisasi dan nasionalisme.⁵⁵ Kondisi Turki Usmani yang pada saat itu sedang dilanda perpecahan akibat Perang Dunia Pertama semakin memantapkan ide nasionalismenya. Maka dia menggunakan ide tersebut untuk menyatukan rakyat Turki. Sementara westernisme adalah yang mendorong dia untuk mengadakan sekularisasi. Menurutnya, kemajuan peradaban yang terjadi di Barat adalah realita perkembangan dunia. Maka untuk dapat maju, Turki harus menerapkan segala sistem seperti yang ada di Barat. Konsekuensinya, sekularisasi juga harus dilakukan seperti halnya yang dilakukan negara-negara Barat terhadap Gereja.

Sekularisasi yang dijalankan Mustofa Kemal dipengaruhi oleh pemikiran politik Barat bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada pemerintahan Dinasti Usmani sebelumnya, pemegang kedaulatan adalah sultan. Maka dari itu kedudukan sultan harus dihapuskan. Sementara khalifah yang hanya mempunyai kekuasaan di bidang spiritual, pada mulanya tetap dibiarkan berkuasa. Namun pada perkembangan selanjutnya, Mustofa Kemal menganggap adanya jabatan khalifah ini menimbulkan dualisme kekuasaan. Khalifah tetap dianggap sebagai kepala negara. Akhirnya, melalui sidang Majelis Akbar Nasional, Mustofa Kemal menghapuskan jabatan khalifah.

⁵⁵ Harun Nasution, *ibid.*, 149

Meskipun secara terang-terangan Mustofa Kemal menjalankan sekularisasi di Turki dan dengan tegas menyatakan sekularisme sebagai ideologi negara, namun sebenarnya dia bukan penentang Islam. Baginya Islam adalah agama yang paling rasional dan diperlukan manusia.⁵⁶ Dia pernah menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang paling masuk akal dan alami, dan itulah sebabnya dijadikan agama terakhir. Agama yang alami harus sesuai dengan akal, ilmu pengetahuan, teknologi maupun logika, dan Islam memenuhi syarat untuk itu.⁵⁷

Namun dalam perkembangan sejarahnya, menurut Mustofa Kemal, agama ini telah dirusak oleh tangan manusia.⁵⁸ Agama digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Dengan alasan tersebut, dia kemudian menentang ide tentang adanya negara Islam beserta segala bentuk syari'at yang mengatur institusi-institusi negara, sosial, ekonomi, hukum, politik, maupun pendidikan. Sekularisasi adalah pilihan yang tepat menurutnya untuk bisa memisahkan persoalan negara dengan agama supaya tetap berada di wilayah sucinya, serta kebebasan beragama bagi rakyat lebih terjamin.

Sekularisasi yang dilakukan Mustofa Kemal Ataturk di Turki tersebut memunculkan interpretasi yang beragam dari berbagai kalangan, baik tokoh Islam maupun non Islam. Banyak tokoh yang dalam interpretasinya dengan tegas menentang itu (dalam hal ini didominasi

⁵⁶ *Ibid.*, 153

⁵⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *ibid.*, 359

⁵⁸ Adian husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 36

ulama konservatif). Namun tidak sedikit pula yang menginterpretasikannya secara lebih moderat dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Pada pembahasan sebelumnya, Yusuf Qaradhawy menegaskan bahwa sekularisme model apapun tetap tidak bisa diterima, menggolongkan sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal sebagai sekularisme ekstrim. Sekularisme Turki memaksa masyarakat Turki yang muslim untuk mengikuti cara-cara hidup Barat. Masyarakatnya dipaksa meninggalkan agama, peradaban, serta kebudayaannya, untuk mengikuti pemikiran, pendidikan, undang-undang dan tradisi Barat.⁵⁹

Yusuf Qaradhawi melihat sekularisme Turki dari empat sudut pandang.⁶⁰

1. Dari sudut pandang agama, sekularisme Atatürk merupakan gerakan pemurtadan yang mengingkari akidah dan syari'ah yang diimani oleh bangsa Turki dan telah mendarah daging selama berabad-abad.
2. Dari sudut pandang nasionalisme, sekularisme Atatürk merupakan gerakan pencabutan tiang-tiang bangsa dan dasar-dasar hidupnya, sehingga Turki menjadi bangsa yang tidak punya pegangan dan tidak memiliki kepribadian di hadapan bangsa-bangsa lain yang teguh dengan akidah, orientasi dan kebudayaan berbeda.

⁵⁹ Yusuf Qaradhawi, *ibid.*, 148

⁶⁰ *Ibid.*, 148-151

3. Dari sudut pandang demokrasi dan kemerdekaan, sekularisme Atatürk merupakan gerakan diktator dan penuh dengan aniaya, padahal masyarakat Turki berusaha melakukan perlawanan untuk mengembalikan akidahnya, tapi negara justru tetap memaksakan kehendak mempertahankan sekularismenya.
4. Dari sudut pandang pemikiran dan peradaban, sekularisme Atatürk merupakan gerakan yang merubah negara menjadi pengikut dan pengekor, gerakan perusak bukan pembangun, gerakan yang tidak membawa hal-hal positif sama sekali.

Bagaimanapun, menurut Qaradhawy, sekularisme yang ditanamkan Atatürk di Turki tidak akan pernah bisa berhasil. Realita yang terjadi di sana bahwa nilai-nilai Islam masih melekat kuat di benak masyarakat Turki semakin mempertegas bahwa sekularisme Turki tidak bisa dibenarkan. Hanyalah sebuah mimpi untuk mencapai kemaslahatan dengan penerapan sekularisme seperti di Turki tersebut.

Muhammad Arkoun melihat sekularisme di Turki berakar pada konsep yang dipahami oleh Atatürk. Menurutnya, sekularisme yang coba diterapkan Atatürk maupun pemimpin-pemimpin dunia Islam semacamnya merupakan hasil dari pemahaman mereka yang masih naif melihat kesuksesan peradaban Barat.⁶¹ Generasi-generasi intelektual Muslim

⁶¹ Arkoun menyatakan bahwa pemahaman sekularisme di tiap-tiap masyarakat, bahkan setiap individu berbeda-beda. Sekularisme tidak bisa diartikan sebagai sesuatu yang hanya muncul di Barat sehingga pemahaman yang benar tentang sekularisme adalah harus berasal dari Barat. Maka untuk memahaminya sehingga bisa diterapkan di wilayah berbeda, seperti halnya di Turki,

seperti halnya Atatürk tidak memiliki pemahaman sejarah yang memadai untuk mampu menggali asal-usul ideologis, fungsi-fungsi sosial politik dan batas-batas filosofis sekularisme di Barat. Sekularisme dan segala upaya modernisasi yang dilakukan Atatürk terhadap Turki merupakan hasil pemahamannya, pemahaman yang timbul dari dampak kekegatan budaya yang dia rasakan ketika dia menerima pendidikan militernya di Prancis. Di negara asalnya yang dibanjiri oleh tabu religius, khurafat dan tabu magik sangat bertentangan dengan kebebasan-kebebasan republik Barat, dinamika ekonomi, kreativitas kultural, keleluasaan visi historis, kenyamanan dan kebersihan tempat-tempat umum dan sebagainya. Latar belakang psikologis tersebutlah yang menjadi pemahaman Atatürk dan mendorongnya membawa Turki pada sekularisme.⁶²

Dalam perspektif sejarah, Komaruddin Hidayat memandang sekularisme Turki merupakan mata rantai yang berkesinambungan dengan gerakan di sana sebelumnya.⁶³ Apa yang dilakukan Atatürk merupakan pengejawantahan ide-ide gerakan modernisasi dan westernisasi yang pernah dicanangkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya, terutama Ziya Gökalp. Ide tentang negara modern yang bebas dari ideologi klerikisme masa Ottomanlah yang coba dipraktikkan, bukan untuk menentang nilai-nilai Islam.

bukanlah sesuatu yang sederhana. Lihat Suadi Putro, *Muhammed Arkoun Tentang Islam dan Modernitas* (Jakarta: Paramadina, 1998), 74-80

⁶² Muhammed Arkoun, *Rethinking Islam*, terj. Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 33-37

⁶³ Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern (Studi Kasus di Turki) oleh Komaruddin Hidayat dalam Nurcholish Madjid, *Islam Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 322

Sekularisme yang dipraktikkan Ataturk tidaklah dimaksudkan untuk menjadi sebuah ideologi anti-agama. Sebagai pengagum Durkheim, Ataturk melihat Islam sebagai refleksi sosial masyarakat Turki yang telah berakar sedemikian rupa, yang memiliki kekuatan integratif bagi pertumbuhan bangsa Turki. Yang diinginkan adalah rasionalisasi agama, agar agama menjadi kekuatan penopang bagi kemajuan Turki.

Memang, apa yang dilakukan Ataturk dalam praktik sekularismenya dapat dikatakan ekstrim. Namun jika melihat sejarah perkembangan Turki, sekularisme Barat yang coba diterapkan tidak akan bisa tumbuh ketika diterapkan pada masyarakat muslimnya. Justru dengan semakin berkembangnya rasionalitas masyarakat, malah semakin merefleksikan bahwa rasionalitas tersebut bukanlah ancaman bagi Islam, karena secara epistemologis, Islam memiliki vitalitas yang bersifat rasional.⁶⁴ Maka dapat dikatakan secara historis, implikasi dari sekularisme Ataturk membawa dua sisi pandangan terhadapnya. Di satu sisi dia dianggap penghianat Islam dengan keekstriman sekularismenya, dan di sisi lain dia justru dianggap penyelamat eksistensi Islam bagi bangsa Turki.

Abdullahi Ahmed An-Na'im mencoba mencermati dilema yang terjadi dengan dipraktikkannya sekularisme di Turki. Pemerintahan sekular berusaha untuk menekan dan mengontrol Islam. Namun realitas masyarakat yang tidak bisa meninggalkan nilai-nilai Islamnya,

⁶⁴ *Ibid.*, 328

menyebabkan terpecahnya Turki menjadi dua kubu politik, yaitu kubu sekular dan kubu Islamis.

An-Na'im mengulas dilema sekularisme Turki dalam tiga permasalahan:⁶⁵

1. Peran militer

Angkatan bersenjata Turki bisa dikatakan merupakan pendukung dan penjaga sekularisme Mustafa Kemal yang paling kuat, sekaligus pelaksana yang paling efektif. Didukung oleh Partai Rakyat Republik, militer mendominasi kehidupan Turki dan berusaha memajukan ideologi modernisasi, westernisasi dan sekularisme. Melalui wajib militer pula, anak-anak muda Turki didoktrinasi tentang ideologi Kemalian sejak dini.

Dilema muncul ketika dalam prakteknya militer memandang dirinya sebagai pelindung negara bukan hanya dari ancaman luar, namun justru lebih banyak memerankan dirinya memerangi ancaman internal, baik itu politik Islam, sektarianisme, maupun nasionalisme Kurdi. Terhitung sampai saat ini empat kali kudeta terhadap pemerintahan dilakukan militer. Ironisnya, desakan untuk membatasi intervensi militer terhadap kehidupan politik negara ini tidak muncul.

⁶⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *ibid.*, 365-381

Namun seiring perkembangan sejarah, sekularisme Turki semakin mapan sehingga tidak lagi harus terus bergantung pada perlindungan militer. Di tambah lagi, persepsi yang timbul akibat berbagai kontradiksi mengenai sekularisme semakin melemahkan posisi militer. Persepsi bahwa militer adalah penjaga sekularisme justru melemahkan legitimasi prinsip tersebut karena dianggap melanggar prinsip dasarnya yang demokratis.

2. Kontrol negara terhadap agama dan pendidikan agama

Dilema sekularisme Turki selanjutnya ada di wilayah keagamaan masyarakatnya. Sekularisme di Turki mengharuskan kontrol pemerintah terhadap agama. Undang-undangnya mengharuskan peran agama terbebas dari ide-ide dan pandangan politik sesuai dengan prinsip-prinsip sekularisme. Untuk itu negara membentuk Departemen Agama sebagai pengatur kegiatan keagamaan dan bertanggung-jawab atas itu. Selain itu undang-undang juga melarang pendirian tarikat dan perkumpulan sufi lainnya, meskipun dalam prakteknya tidak diterapkan secara ketat. Dalam urusan peribadatan, hanya yang diperbolehkan negara saja yang dapat dilangsungkan. Kondisi seperti ini tentu saja menyulitkan beberapa kelompok agama untuk menjalankan agamanya, terutama bagi kelompok agama yang tidak resmi.

Selain di wilayah keagamaan, kontrol negara juga menjadi dilema ketika diterapkan di wilayah pendidikan keagamaan. Sejak awal pemerintahan Atatürk, seluruh institusi pendidikan agama diambil alih negara dan ditempatkan di bawah kementerian pendidikan. Sistem pendidikan yang semula dijalankan para ulama di ambil alih dan ganti diterapkan pendidikan nasional modern dan tersentralisasi. Dalam perkembangannya, sistem pendidikan seperti ini menimbulkan perdebatan dari banyak kalangan. Bagaimana seharusnya sistem pendidikan keagamaan di negara yang berideologi sekular diungkapkan secara beragam oleh berbagai kalangan yang berbeda.

3. Larangan menggunakan kerudung

Isu yang paling kontroversial di antara kontradiksi sekularisme Turki adalah masalah kerudung. Di negara manapun kerudung sering diasosiasikan dengan kemunculan gerakan Islamis. Bagi Turki sekular, tentu saja ini merupakan masalah dilematis, di mana negara yang berideologi sekular harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa masyarakatnya mayoritas Muslim.

Dalam masalah ini, An-Na'im lebih memfokuskan pembahasan ke arah negosiasi negara terhadap dilema mengenai kewajibannya menghormati pilihan pribadi dan kebebasan beragama dengan keharusannya mengatur peran politik agama. Dalam sejarah perkembangannya, peraturan mengenai penggunaan kerudung mengalami

berbagai perubahan. Namun yang jelas, dilema yang terjadi lebih mengarah pada perdebatan mengenai “ranah publik” dan “ranah privat”, di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melarang pemakaian kerudung tersebut di “ranah publik” dan memperbolehkannya di “ranah privat”.

Kesulitan untuk mendefinisikan kedua ranah tersebut serta mempertahankan konsistensi dalam pelaksanaan prinsip-prinsipnya, membuahkan berbagai opini dari berbagai kalangan. Beberapa kalangan masyarakat berkomentar bahwa pelarangan berkerudung di “ranah publik” harus didefinisikan secara jelas, karena kalau tidak, akan menimbulkan perluasan pelarangan ke wilayah lainnya secara semena-mena dan tidak adil. Saran lain juga muncul dari beberapa akademisi dan pembuat opini, yaitu peringanan larangan berjilbab dengan membedakan antara penyedia dan penerima layanan publik. Yang wajib menjaga kenetralan adalah penyedia layanan publik, sedangkan penerima layanan dijamin kebebasannya.

Kelompok lainnya menyatakan mendukung penghapusan pelarangan berjilbab dengan alasan semua warga negara, baik penyedia maupun penerima layanan publik, memiliki hak konstitusional untuk menggunakan simbol ideologi dan agama. Dengan pendekatan ini, netralitas dan keadilan pemerintahan kepada penerima layanan publik ditentukan oleh niat baik penyedia layanan. Namun mengenai pertanggung-jawaban dari pelanggaran yang sifatnya tidak bisa

bagaimanapun, itu masih menimbulkan dilema ketika orang dipertanyakan diverifikasi (bias).

Dari ketiga dilema yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im di atas menunjukkan bahwa model sekularisme yang dibangun Mustafa Kemal Atatürk benar-benar problematis karena didasarkan pada kontrol penuh negara atas agama. Negara berusaha mengontrol dan memanipulasi peran Islam dalam kebijakan publik dan politik atas nama sekularisme sambil menolak warga negara yang mengambil Islam sebagai kekuatan dasar dalam kehidupan serta hak dan kesempatan mereka untuk hidup dengan keyakinannya. Model ini benar-benar paradoks karena tidak bisa menjalankan kontrol penuh atas agama tanpa melanggar hak asasi manusia warga negara.

Namun, baik Abdullahi Ahmed An-Na'im maupun tokoh-tokoh yang lainnya memandang sekularisme di Turki semakin menunjukkan perubahan-perubahan menuju kemajuan. Peristiwa-peristiwa politik sejak masa Atatürk sampai pada masa-masa sekarang ini menunjukkan indikasi yang positif. Sekularisme yang awalnya terkesan otoritarian menunjukkan perubahan-perubahan ke arah sekularisme lebih fleksibel, tidak kaku dan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada agama dan institusi keagamaan.

Bagi gerakan Islamis, semakin terbukanya iklim demokrasi dan modernisasi pemikiran di kalangannya seakan memberi warna baru bagi

pemikiran politik Islam. Beberapa tokoh menyatakan bahwa telah terjadi transformasi pemikiran di dalam kelompok-kelompok Islamis seluruh dunia. Di Turki, kemenangan AKP yang di dalamnya terdiri dari kelompok muda Islamis mengisyaratkan adanya peralihan dari masa-masa kebuntuan gerakan Islamis menuju keterbukaan jalan dengan membawa terobosan-terobosan baru pemikiran. Selanjutnya yang diharapkan adalah rekonsiliasi bisa terwujud antara kubu Islamis dengan kubu sekular yang selama ini berseteru.

